

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi atau *Agency Theory* yang diungkapkan oleh Jensen and Meckling (1976) merupakan teori yang menjelaskan mengenai seberapa penting adanya pemisahan kepemilikan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen (*agent*). Dengan adanya pemisahan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham (*principal*) dalam mendapatkan jumlah keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Namun pemisahan kepemilikan tersebut tidak hanya membawa dampak positif bagi *principal* maupun *agent*, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu manajemen perusahaan memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi-informasi yang ada pada perusahaan yang tidak diketahui oleh pemegang saham. Selain itu, pemisahan kepemilikan juga membawa dampak pada kurangnya tingkat keterbukaan atau *transparancy* pada proses penggunaan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham kepada perusahaan

Tingkat keselarasan laporan tahunan bisa menjadi salah satu *agency conflict* antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Karena menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Pertentangan dan tarik-menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *agency theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information* (AI) yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri (Supriatna & Kusuma, 2009).

Teori agensi memaparkan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula suatu perusahaan memunculkan biaya keagenan. Salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan yaitu dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas, termasuk melalui pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*). Titik berat teori keagenan adalah menentukan kontrak yang paling optimal guna mengatur hubungan (*principal*) dan agen (*agent*) (Rahardjo, 2018). *Corporate governance* mengacu pada model dari struktur dan kekuatan yang menentukan hak dan kewajiban dari berbagai kelompok yang terlibat dalam menjalankan organisasi (Alkhafaji, 2007) termasuk hak dan kewajiban dari agen ataupun prinsipal. Untuk mengatasi konflik keagenan, manajemen dapat mengungkapkan informasi perusahaan yang lebih luas (Permata et al., 2020). Informasi yang luas tersebut dapat dilihat dengan melihat tingkat keselarasan yang ada di laporan tahunan dengan menggunakan IRF.

2.2 Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan IRF

Laporan tahunan merupakan laporan komprehensif atas aktivitas perusahaan pada tahun sebelumnya. Tujuan laporan tahunan adalah untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya tentang aktivitas dan kinerja perusahaan. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016, Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi maka perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui laporan tahunan.

Salah satu negara pelopor penerapan IR adalah Afrika Selatan melalui pedoman King III. Laporan terintegrasi dikembangkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC) pada tahun 2011 dengan dukungan *Global Reporting Initiative* (GRI). Pada tahun 2013, *International Integrated Reporting Council*

mengeluarkan *Integrated Reporting Framework* (IRF) sebagai pedoman penyusunan laporan tahunan berdasarkan *integrated reporting*. Laporan tahunan dengan model *integrated reporting* akan menggabungkan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, catatan manajemen, kompensasi, serta laporan kegiatan sosial dan lingkungan menjadi satu laporan yang terintegrasi. Pada *integrated reporting* tersebut terdapat elemen-elemen yang menggambarkan kinerja perusahaan dan upaya perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan berpartisipasi dan mempengaruhi permodalan perusahaan

Kualitas keterbukaan informasi dapat dilihat dari tingkat keselarasan laporan tahunan. Tingkat keselarasan laporan tahunan dapat diukur menggunakan *Integrated Reporting Framework* (IRF) yaitu dengan *content element*. Adapun elemen yang harus dipenuhi agar sebuah laporan perusahaan sudah disebut selaras yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Organisasi dan Lingkungan Eksternal
Gambaran Organisasi menjelaskan organisasi perusahaan yang baik dari visi, misi, budaya, struktur kepemilikan, maupun aktivitas perusahaan. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti aspek hukum, sosial, lingkungan, ekonomi, tantangan pasar, dan kondisi politik.
2. Tata Kelola
Tata kelola atau *governance* menggambarkan struktur tata kelola perusahaan yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan menciptakan *value* baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. Model Bisnis
Model bisnis perusahaan adalah sistem perusahaan yang dapat mengubah *input* melalui aktivitas perusahaan yang menghasilkan *output* dan *outcome*.
4. Risiko dan Peluang
Risiko dan peluang menjelaskan risiko dan peluang spesifik pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai

tujuannya. Elemen ini juga menjelaskan cara perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang yang terjadi pada perusahaan.

5. Strategi dan Alokasi Sumber Daya

Strategi dan alokasi sumber daya menjelaskan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia pada perusahaan.

6. Kinerja

Kinerja menggambarkan kinerja perusahaan pada tahun berjalan yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

7. Prospek

Prospek masa depan menjelaskan kondisi pada masa akan datang yang berkaitan dengan perusahaan. Prospek masa depan meliputi prospek maupun tantangan yang akan dihadapi perusahaan.

8. Dasar Pengungkapan Elemen

Dasar pengungkapan elemen merupakan dasar yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan agar dapat dievaluasi tingkat pemenuhan kriteria pelaporan.

2.3 Integrated Reporting

2.8.1 Pengertian Integrated Reporting

Menurut *IR Framework (Integrated Report Framework)*, laporan terintegrasi merupakan komunikasi yang ringkas mengenai bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja dan juga prospek di dalam konteks lingkungan eksternalnya yang mengarah ke penciptaan nilai dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Laporan terintegrasi jauh lebih dari sekedar menggabungkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan ke dalam satu dokumen (Krzus, 2011).

Pada tahun 2010 menjadi formasi resmi untuk *International Integrated Reporting Comitte (IIRC)* yang diketuai oleh Sir Michael Peat seorang Principal Private Secretary Prince of Wales. Pada tahun 2011, IIRC menerbitkan *The Discussion Paper Integrated Reporting – Communicating Value*. Didalamnya terdapat

pertimbangan alasan untuk *Integrated Reporting* yang menawarkan proposal awal mengenai Kerangka *International Integrated Reporting* dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya menuju pembuatan dan penerapannya. Dan pada tahun 2011 pula *the International Integrated Reporting Committee* berganti nama menjadi *The International Integrated Reporting Council (IIRC)*.

Pada tahun 2012, IIRC merilis *prototype* mengenai *Integrated Reporting Framework*. ini merupakan langkah sementara yang dimaksudkan untuk menunjukkan kemajuan dalam mendefinisikan konsep dan prinsip yang mendorong IR dan mendukung kemampuan organisasi untuk menghasilkan laporan terintegrasi. Lalu pada April 2013 IIRC menerbitkan '*consultation draft*'. Hasil akhirnya yaitu pada Desember 2013 dirilis IIRC Framework sebagai pedoman dalam penerapan *integrated reporting*. *The International Integrated Reporting Council (IIRC)* adalah sebuah kombinasi global atas regulator, investor, perusahaan pembuat standar, profesi akuntansi, dan *Non Government Organisation (NGO)*.

2.8.2 Tujuan Integrated Report

The International (IR) framework telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan menyediakan landasan untuk masa depan. Adapun tujuan dari *Integrated Reporting* yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan kualitas ketersediaan informasi untuk penyedia modal keuangan sehingga ketersediaan alokasi modal lebih efektif dan efisien.
- 2) Untuk mempromosikan pendekatan yang lebih terpadu dan efisien yang mengacu pada pelaporan yang berbeda dan mengkomunikasikan seluruh faktor secara material mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai jangka panjang.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan yang luas (keuangan, manufaktur, intelektual, manusia sosial dan hubungan serta alam) untuk mendorong pemangku kepentingan memahami interdependensi antar modal.

- 4) Mendukung pemikiran terintegrasi , pembuatan keputusan dan perilaku yang berfokus pada penciptaan nilai jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2.8.3 Manfaat *Integrated Reporting*

Pelaporan terintegrasi menyatukan informasi yang material tentang strategi, tata kelola kinerja, dan juga prospek organisasi dengan cara yang mencerminkan konteks komersial, sosial dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Ini mengarah pada artikulasi yang jelas dan ringkas tentang penciptaan nilai yang berguna dan relevan bagi semua pemangku kepentingan, ada beberapa manfaat dari pelaporan terintegrasi baik dari perspektif organisasi maupun dari luar organisasi :

- 1) Mendorong organisasi untuk berfikir secara terintegrasi.
- 2) Satu laporan yang mudah diakses, jelas dan ringkas.
- 3) Menciptakan nilai bagi *stakeholders* melalui identifikasi dan pengukuran terhadap faktor-faktor non finansial.
- 4) Mengidentifikasi risiko dan peluang lebih baik.
- 5) Meningkatkan proses internal yang lebih baik yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bisnis dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

2.4 *Corporate Governance* (CG)

2.8.1 Pengertian *Corporate Governance* (CG)

Corporate Governance (CG) dikenal juga sebagai tata kelola perusahaan. *Corporate Governance* didefinisikan sebagai proses yang menjadi acuan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi (Krechovska & Prochazkova, 2013). Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Teori keagenan merupakan dasar yang

digunakan untuk memahami *corporate governance*. Karena teori keagenan mengatur kontrak yang terjadi antara anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara pemilik dan manajemen (*agent*).

Munculnya krisis ekonomi finansial yang terjadi di Asia sejak tahun 1997, diawali dari krisis Jepang pada tahun 1990 yang sangat mempengaruhi kinerja dari negaranegara di kawasan Asia, salah satunya Indonesia. Isu penerapan seputar *Good Corporate Governance* menyertai munculnya krisis tersebut, sebagai alasan utama terjadinya krisis ekonomi se-Asia yang telah dikemukakan oleh Sachs (1998) dalam Muhaimin (2009). Untuk menanggulangi krisis tersebut dibentuklah Komite Nasional

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999. Lalu terdapat usulan penyempurnaan peraturan pencatatan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bag emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit pada tahun 1998, *Corporate Governance* (CG) mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Melalui Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pedoman umum GCG diperkenalkan pada tahun 2001. Namun pada tahun 2004 KNKCG berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF).

2.8.2 Prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance*

Menurut KNKG pada tahun 2006, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ditetapkan setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG bertujuan untuk mencapai *sustainability*

perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ada beberapa prinsip-prinsip GCG yaitu sebagai berikut :

- 1) Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4) Independensi (*Independency*), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8.3 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Surya (2006), penerapan *good corporate governance* secara konkrit memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- 2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Manfaat dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena aktor kepercayaan) yang ada pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value* (nilai perusahaan).
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan deviden.

2.5 Struktur *Corporate Governance*

Struktur didefinisikan sebagai suatu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir dan dikoordinasi. Struktur *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *corporate governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan dan dikendalikan. Secara spesifik, struktur CG harus di desain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali. Peraturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1 Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan tercatat wajib memiliki:

- 1) Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

- 2) Komite Audit.
- 3) Sekretaris perusahaan.

Serta menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal guna meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka perusahaan harus memiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun dalam penelitian ini, elemen-elemen struktur *corporate governance* antara lain:

2.8.1 Proporsi Komisaris Independen

Dewan Komisaris adalah bagian dari perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. KNKG membagi Dewan Komisaris menjadi dua kelompok yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Terafiliasi. Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris. Komisaris Terafiliasi merupakan pihak yang mempunyai hubungan bisnis atau kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan perusahaan itu sendiri.

Komisaris Independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan pemegang saham non-pengendali, hal ini memuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 pasal 20 yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota komisaris.

Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, diantaranya yaitu : menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap

pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas badan perseroan. Komisaris sebagai pengawas kerja manajemen haruslah pihak yang independen yaitu pihak yang bebas dari kepentingan internal perusahaan sehingga dapat menjadi penyeimbang bagi para pemegang sahamnya baik saham mayoritas maupun minoritas (Hapsari et al., 2019). Dengan hal tersebut komisaris independen dapat meningkatkan kualitas ketersediaan informasi tingkat keselarasan laporan tahunan dengan pelaporan terintegrasi.

2.8.2 Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan, melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi menyusun pedoman dan melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, berisikan diantaranya :

- 1) Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi.
- 2) 1 (satu) diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
- 3) Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 4) Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Selain daripada itu di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik termasuk dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi tersebut dapat dilihat dari tingkat keselarasan laporan

tahunan yang di publikasikan oleh emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hapsari (2019), bahwa tugas direksi dengan adanya *integrated reporting* yaitu adanya pelaporan yang terintegrasi memudahkan dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang.

2.8.3 Jumlah Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Jumlah komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut haruslah komisaris independen yang tercatat sekaligus menjadi komite audit lainnya. Keberadaan Komite Audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen yang lebih efektif dan efisien serta mendorong peningkatan pengungkapan informasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan. Manajemen perusahaan tersebut tentunya dapat mendukung dalam mempublikasikan *Integrated Reporting* (IR).

Ketentuan dan peraturan mengenai Komite Audit diantaranya :

1. Surat Edaran No.SE-03/PM/2000, merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit.
2. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. KEP-339/BEJ/07-2001 mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit.
3. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan BUMN mempunyai Komite Audit.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 mengatur tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2.8.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan perbandingan kepemilikan saham manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di bursa saham. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial merupakan besaran proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen (direksi dan komisaris). Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen, karena semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin berusaha memaksimalkan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2015) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Ahmad (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka IR. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan pelaporan terintegrasi potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sebagai pemegang saham (*shareholders*).

2.8.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Bernandhi & Muid, 2013). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Pemegang saham seperti

kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen (Ardianingsih & Ardiyani, 2010) .

Menurut teori agensi semakin besar proporsi kepemilikan institusional di dalam sebuah perusahaan maka akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap agen (Jensen & Meckling, 1976). Elemen *integrated reporting* merupakan salah bentuk dari pengungkapan sukarela sehingga diyakini dengan adanya kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap terhadap penerapan elemen *integrated reporting* di dalam laporan tahunan. Hal ini sebagai implementasi dari pihak manajemen dalam mengungkapkan informasi sukarela sebagai akibat pengawasan yang ketat dari pihak *principle*.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan Tingkat keselarasan Laporan tahunan dengan *Integrated Reporting Framework*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Rudi Ahmad (2017)	Pengaruh Struktur CG terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka <i>Integrated Reporting</i>	1. Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Tingkat Leverage tidak

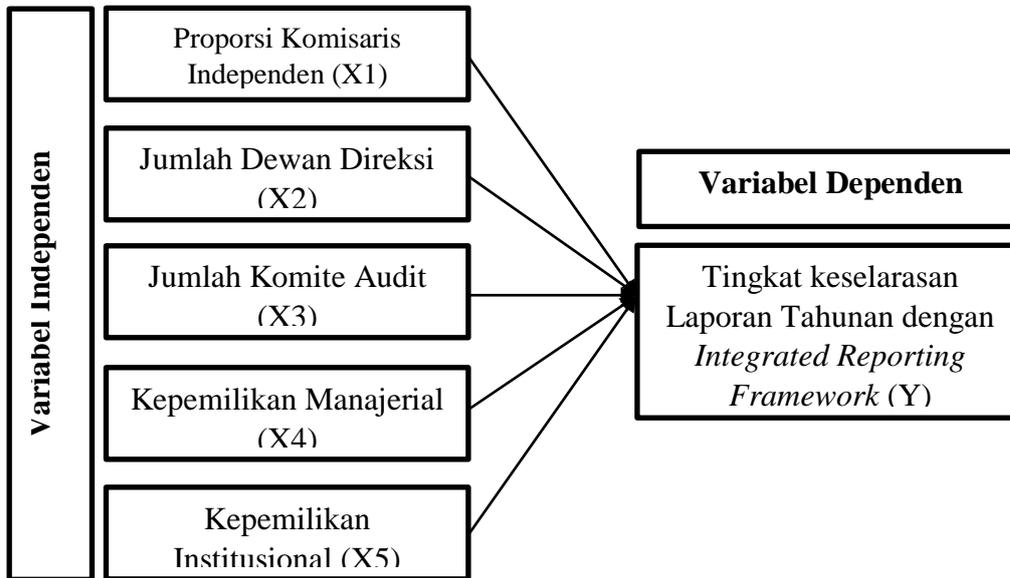
			<p>berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR</p> <p>2. Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR.</p> <p>3. Struktur CG, Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage dan Ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR.</p>
2.	Rudi Ahmad dan Ratna Candra Sari (2017)	Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap terhadap tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka <i>Integrated Reporting</i>	<p>1. Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap tingkat keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR.</p> <p>2. Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP secara bersama-</p>

			sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR.
3.	Ira Astria Novaridha (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Elemen-Elemen Integrated Reporting	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap elemen-elemen <i>Integrated Reporting</i> .
4.	Dini Wahjoe Hapsari, Vennika Qashash, dan Daniel T. H. Manurung (2019)	Implikasi Corporate Governance dalam Pelaksanaan Integrated Reporting pada Bumn Nonkeuangan	Hasil kepemilikan institusi, kuantitas direksi dan komite audit, serta keberadaan komisaris independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan integrated reporting.
5.	Destiara Dyah Puspita Sari, Satria Yudha Wijaya, dan Munasiran Miftah (2020)	Kesiapan Perusahaan di Indonesia Menerapkan <i>Integrated Reporting</i>	1. Komite audit dan Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesiapan perusahaan di Indonesia menerapkan integrated reporting.

			2. Aktivitas internasional tidak mempengaruhi kesiapan perusahaan di Indonesia menerapkan <i>integrated reporting</i> .
6.	Lucky Mandalika, Hermanto dan Lilik Handjani (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Luas Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i> dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan	1. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>Integrated Reporting</i> . 3. Proporsi komisaris independen, keahlian komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>Integrated Reporting</i>
7.	Maharanny Yulyan, Winwin Yadiati, Said Aryanindito (2021)	<i>The Influences of Good Corporate Governance and Company Age on Integrated Reporting Implementation</i>	1. Dewan komisaris independen dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap implementasi <i>Integrated Reporting</i> 2. Komite audit, pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>integrated Reporting</i>

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.8 Bangunan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014), mengungkapkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan penjelasan dari teori tersebut, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

2.8.1 Proporsi Komisaris Independen

Menurut Ooritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan NO. 33/POJK.04 tanggal 8 Desember 2014 yang berisikan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu diantaranya adalah komisaris independen dan juga jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris sebagai pengawas kerja manajemen haruslah pihak yang independen yaitu pihak yang bebas dari kepentingan internal perusahaan sehingga dapat menjadi penyeimbang bagi para pemegang sahamnya baik saham mayoritas

maupun minoritas. Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer (Muryati & Suardikha, 2014). Dengan semakin banyaknya proporsi komisaris seperti penelitian yang dilakukan Hapsari et al., (2019) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat keselarasan dengan rerangka *Integrated Reporting*. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu :

H1 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Integrated Reporting Framework*

2.8.2 Jumlah Dewan Direksi

Pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian, yang merupakan issue utama dari *agency theory*, menimbulkan pertanyaan dasar bagi pemegang saham mengenai bagaimana mereka seharusnya memonitor manajer dan melakukan pengendalian sehingga manajer akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Peranan dewan pengurus diperlukan karena pemegang saham yang tersebar membuat sulit pemegang saham minoritas untuk memonitor dan mengontrol manajemen perusahaan. Hal tersebut membatasi kesempatan bagi pemegang saham untuk mengeliminasi *agency costs*. Dewan direksi merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan *agency problem* karena peranannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen atas nama pemegang saham (Wulandari, 2001). Banyaknya kuantitas dewan direksi mampu meningkatkan kekuatan manajerial dan dapat meningkatkan fokus pada pelaporan karena kuantitas anggota eksekutif di dewan meningkat (Hapsari et al., 2019). Artinya dengan semakin banyak dewan dieksi yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dalam menetapkan elemen IRF. Maka hipotesis yang dirumuskan dari uraian tersebut adalah:

H2 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Integrated Reporting Framework*.

2.8.3 Jumlah Komite Audit

Agency theory memprediksikan bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problems*. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Wulandari, 2001). Komite audit memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, sehingga tidak melakukan penyelewengan. Dengan adanya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, perusahaan akan cenderung lebih terbuka mengenai informasi yang disajikan oleh perusahaan. Dengan adanya hal tersebut komite audit perusahaan tersebut tentunya dapat mendukung dalam mempublikasikan *Integrated Reporting* (IR) secara lebih luas dan transparan. Penelitian menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka *Intgerated Reporting* (Ahmad, 2017). Penelitian yang dilakukan Sari et al., (2020) menyebutkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan *integrated reporting*. Dari penjelasan tersebut maka diberi hipotesis yaitu :

H3 : Jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat keselarasan Laporan Tahunan dengan *Integrated Reporting Framework*.

2.8.4 Kepemilikan Manajerial

Perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk mengurangi asimetris informasi antara manajemen dan pemilik. Masalah utama keagenan adalah adanya perbedaan antara pemilik dengan manajer. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya.

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckeling, 1976). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan

manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak lebih rendah dan pengawasan menjadi lebih tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Integrated Reporting Framework*.

2.8.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusi yang besar dapat memperbesar kontrol investor terhadap perusahaan, sehingga besarnya kepemilikan saham oleh institusi dapat menjadi salah satu alasan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Nabor & Suardana, 2014). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen (Permata et al., 2020). Pengawasan yang baik menunjukkan perusahaan telah menerapkan pengelolaan yang baik dan dapat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun laporan tahunan terintegrasi yang hasilnya akan lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian penelitian Hapsari dkk (2020), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap laporan terintegrasi. Lalu dapat disimpulkan dengan hipotesis :

H5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Integrated Reporting Framework*